

**NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM NASKAH BUKU PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Oleh :

WINDRA MAMONTO
NIM : 19.23.119



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1446 H/2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windra Mamonto
Nim : 1923119
Tempat/Tgl.Lahir : Bongkudai 02 April 2001
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Bongkudai Kec.Modayag Barat Kab.Bolaang
Mongondow Timur
Judul : Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku Pendidikan
Agama Islam Tingkat SMA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado 1 oktober 2024



Peneliti,

Windra Mamonto
Nim.1923119

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA" yang disusun oleh Windra Mamonto, NIM: 1923119, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munawaziyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan *beberapa perbaikan*.

Manado, Oktober 2024 M
27 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Sahari, M.Pd.I	(.....)
Sekretaris	: Faisal Ade, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Dr. Arhanuddin, M.Pd.I	(.....)
Penguji II	: Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sahari, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing II	: Faisal Ade, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Manado


Dr. Arhanuddin, M.Pd.I
NIP. 198301162011011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis yang berjudul “*Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA*” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dengan izin-Nya pula karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw. patut menghaturkan sholawat dalam salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan samapai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan seminar hasil ini, tentu mengalami banyak tantangan dan hambatan, tetapi berkat pertolongan Allah swt, dan motivasi serta dukungan dari diri sendiri dan berbagai pihak akhirnya seminar hasil ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan seminar hasil ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada Dr. Sahari selaku pembimbing I dan Faisal Ade, M.Pd selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dan pengarahan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar hasil ini dengan baik.

Tak lupa pula ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan yang terhormat dan terkasih kepada:

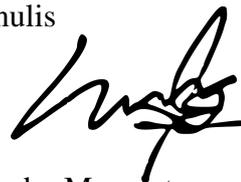
1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Arhanuddin, M.Pd I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Manado.

3. Dr. Adri Lundeto M.Pd.I selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Manado.
4. Dr. Dra. Nurhayati, M.Pd.I selaku wakil dekan II Bidang Admisistrasi Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado.
5. Dr. Ishak Wanto Talibo, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ismail K Usman M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado.
7. Abrari Ilham M.Pd selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado.
8. Dr. Sahari, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan Faisal Ade, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi.
9. Kedua orang tua tercinta Djahir Mamonto dan Ibu Rita Momintan dan kakak Wisliani Mamonto. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, perhatian, pengorbanan yang secara tulus diberikan tanpa pamrih.
10. Teman seperjuangan, Wahyudi Chandra, Muhlis Lantapa, Reza Alamri, Ansar Rahim, Qadavi Mamonto, Dandung Mokoagow, Nur Wahida Mukaminan, Ahmad Abud Spirunaung, , serta PAI C Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
11. Segenap pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang secara tulus telah berkontribusi dalam penyelesaian seminar hasil ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.
Aamiin yaa robbal 'alamiin.

Manado, Oktober 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Windra Mamonto', written in a cursive style.

Windra Mamonto

Nim. 1923119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
G. Penelitian Yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	12
A. Landasan Teoretis	12
1. Demokrasi	12
2. Nilai – nilai Demokrasi	15
3. Musyawarah	19
4. Kebebasan Berpendapat	22
5. Kondisi Demokrasi Indonesia	24
6. Toleransi.....	26
7. Pendidikan Agama Islam	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian.....	35
1. Pengertian Kualitatif	35
a. Pengertian Analisis Konten.....	35
b. Desain Analisis Konten.....	36
c. Analisis Sosiologis	36

2. Sumber Data.....	37
3. Teknik Analisis Data.....	38
a. Refleksi Sosiologis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Umum Naskah Buku PAI Kelas XII	40
2. Identitas Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia	41
B. Hasil Penelitian	42
1. Nilai Demokrasi Dalam Konten Buku PAI Kelas XII.....	42
2. Sejauh Mana Konten Itu Relevan Dengan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia Sekarang	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Windra Mamonto

Nim : 1923119

**Judul : Nilai-nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku Pelajaran Pendidikan
Agama Islam Tingkat SMA**

Dalam kehidupan sehari-hari prinsip demokrasi merupakan hal yang harus diutamakan karena dalam pengambilan keputusan harus diambil dengan sikap demokratis atau musyawarah dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi maka harus menghargai kebebasan berpendapat tak anti kritik dan harus demokratis. Berdasarkan realita yang ada, kurikulum pendidikan yang memuat bahan ajar bagi siswa pada proses pengimplementasiannya masi kurang. Penelitian ini mempertanyakan nilai-nilai demokrasi dan sejauh mana konten itu relevan dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia ?. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *content analisis* atau analisis isi.

Berdasarkan penelitian, menyimpulkan bahwa di dalam naskah naskah buku PAI tingkat SMA masih terkandung konten nilai-nilai demokrasi diantaranya demokrasi, kebebasan berpendapat, toleransi, musyawarah, menghargai hak/pendapat orang lain dan pluralisme/kemajemukan.

Kemudian relevansi konten nilai demokrasi dalam naskah buku pendidikan agama Islam, memang ada beberapa nilai yang tidak relevan/tidak selaras dengan kondisi Indonesia sekarang seperti konten nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, padahal konten tersebut sudah memadai tetapi didalam proses pembelajarannya masi kurang. Akibat dari kurangnya implementasi pembelajaran yang demokratis disekolah itu bisa berdampak pada masyarakat luas, dengan kenyataan ini sekolah belum mengimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi perlu ditekankan lagi agar kedepannya berdampak lebih luas.

Kata Kunci: Nilai Demokrasi, Naskah Buku, Pendidikan Islam

ABSTRACT

Namae Of Compiler : Windra Mamonto
Student IDE Number : 1923119
Study Program : Islamic Religious Education (PAI)
Thesis Title : Values of Democracy in the Book Script Islamic Religious Education Lessons at High School Level

In daily life, the principle of democracy is a priority because in decision-making it must be taken with a democratic attitude or deliberation, in the life of a state that adheres to a democratic system, it must respect freedom of opinion, not anti-criticism and must be democratic. Based on the existing reality, the educational curriculum that contains teaching materials for students in the implementation process is lacking. This research questions democratic values and the extent to which the content is relevant to democratic life in Indonesia. The approach used is the content analysis or content analysis approach. Based on research, it was concluded that the manuscript of the PAI book at the high school level still contains the content of democratic values including democracy, freedom of opinion, tolerance, deliberation, respect for the rights/opinions of others and pluralism/pluralism. Then the relevance of the content of democratic values in Islamic religious education book manuscripts, there are indeed some values that are not relevant/not in line with the current conditions of Indonesia such as the content of democratic values and freedom of opinion, even though the content is adequate but in the learning process it is lacking. As a result of the lack of democratic learning implementation in schools, it can have an impact on the wider community, with this reality schools have not implemented as badly as possible. Therefore, democratic values need to be emphasized again so that in the future it will have a wider impact.

Keywords : *Values of Democracy, Book Script, Islamic Education*

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado
Nomor registrasi : 01059

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta penduduknya yang sedikit.¹

Dalam kehidupan sehari-hari prinsip demokrasi merupakan hal yang harus diutamakan terlebih lagi dalam dunia Pendidikan karena dalam pengambilan keputusan harus diambil dengan sikap demokratis atau musyawarah dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi maka harus menghargai kebebasan berpendapat tak anti kritik dan harus demokratis. Faktanya, permusyawaratan dalam masyarakat kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari "stigma" berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan demokrasi dalam masyarakat, yang menyebabkan gampang terprovokasi terhadap isu-isu sosial dan politik. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran sikap demokratis adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Pembelajaran sikap demokratis tidak hanya pada aspek kognitifnya saja,

¹Riska Muazzinah, "Konsep Demokrasi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019). h. 1.

tapi idealnya harus pada tahap penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang diajarkan.

Upaya penanaman sikap demokratis melalui pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan haruslah melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru pendidikan nasional, yang tujuan akhirnya adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berpegang pada nilai keadaban.

Program merdeka belajar yang mulai dicanangkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan transformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan berprofil Pancasila sangat mendukung penerapan nilai-nilai demokrasi.²

Sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis melalui pendidikan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila.³ Pendidikan mempunyai peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa, kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang tidak hanya berpaku pada kecerdasan intelektual melainkan kecerdasan yang menyeluruh yang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tercakup pula karakter berakhlak mulia sebagai bukti bahwa Indonesia mengharapkan jati diri bangsanya untuk dapat berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karakter cerdas merupakan sebuah landasan berpikir bagi manusia untuk dapat menjalani kehidupannya secara baik, harmonis, sejahtera yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya melainkan juga untuk orang lain. Namun realita yang terjadi saat ini, bangsa Indonesia mengalami krisis akhlak akibat

²Unu Nurahman, "Guru Berbagi Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pendidikan Yang Memerdekakan," [https://Ayoguruberbagi.Kemdikbud.Go.Id/Cerita/Implementasi - Nilai-Nilai Demokrasi-Dalam-Pendidikan-Yang-Memerdekakan/](https://Ayoguruberbagi.Kemdikbud.Go.Id/Cerita/Implementasi%20-%20Nilai-Nilai%20Demokrasi-Dalam-Pendidikan-Yang-Memerdekakan/), 2022.

³M A Abdul Roziq, 'Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Yang Berbasis Pada Lingkungan Sekolah', *Jurnal Rontal Keilmuan*, 2.1 (2016), h.2-3.

minimnya cara berpikir yang cerdas, salah satunya di lingkungan sekolah. Permasalahan yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah seperti perlakuan kekerasan antara siswa dengan siswa lain (*bullying*), bolos sekolah, adanya pergaulan bebas, ketidakjujuran yang membudaya, menurunnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan hal lainnya.⁴ Hal tersebut menunjukkan tidak ada hasil yang dari apa yang dipelajarinya di sekolah, karena implementasi tidak menunjukkan watak orang yang berpendidikan. Oleh karena itu Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai religius dan membawa nilai-nilai karakter Nasionalisme dan Islamisme.

Banyak kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Pada sila ke empat Pancasila bahwa nilai musyawarah harus diutamakan karena itu termasuk dalam demokrasi kita yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebebasan.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.⁵ Jadi, pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

⁴Fira Ayu Dwiputri and Dinie Anggraeni, "Penerapan Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Siswa," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): h. 1268.

⁵Prof. Dr. Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2005, hlm. 2.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Masih banyak yang bisa dijadikan bahan tulisan, akan tetapi penulis membatasi permasalahan berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dalam naskah buku PAI tingkat SMA Kelas XII:

1. Kurangnya kebebasan berpikir siswa.
2. Kurangnya kreatifitas siswa.
3. Tidaknya ada wadah bagi siswa dalam mengeksplorasi hasil pikiran serta kreatifitas dalam proses pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan untuk di kaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Konten apa saja yang mengandung nilai-nilai demokrasi dalam naskah buku PAI tingkat SMA kelas XII?
2. Sejauh mana konten itu relevan dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui nilai demokrasi dibahas dalam konten buku mata pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII.
2. Untuk mengetahui sejauh mana konten itu relevan dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia sekarang?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat secara pribadi sehingga bisa menambah khasanah keilmuan mengenai nilai-nilai demokrasi dalam naskah buku pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SMA. Selain itu sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Agama Islam.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan literasi dari nilai-nilai demokrasi dalam naskah buku pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SMA, selain itu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dengan jurusan yang sama.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud utama dalam rancangan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Nilai

Menurut Baier nilai sering kali dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh sudut pandangnya yang berbeda-beda pula. Contohnya seorang sosiolog mendefinisikan nilai sebagai suatu keinginan, kebutuhan, dan kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan dari masyarakat. Seorang psikolog akan menafsirkan nilai sebagai suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis, seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada tahap wujud tingkah lakunya yang unik. Sementara itu, seorang antropolog melihat nilai sebagai “harga“ yang melekat pada pola budaya masyarakat seperti dalam bahasa, adat kebiasaan, keyakinan, hukum dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang dikembangkan manusia. Perbedaan pandangan mereka dalam memahami nilai telah berimplikasi pada perumusan definisi nilai itu sendiri.⁶

2. Naskah

Secara etimologis, pengertian naskah diambil dari bahasa Arab yaitu kata *nushkhatum* yang memiliki arti ‘potongan kertas’. Hal ini karena umumnya naskah berbentuk beberapa lembaran yang perlu dikoreksi sebelum dipakai. Pengertian naskah akan menjelaskan mengenai tema dan isi yang dapat diterima oleh penonton.

⁶Beny dwi Lukitoaji, *Bahan Ajar Pendidikan Nilai*, 2019. h. 7.

Secara umum, pengertian naskah adalah tulisan yang biasa atau umum dikenal semua orang yang berkecimpung di dunia penulisan. Naskah berfungsi untuk berbagai hal, misalnya bahan bacaan, sebagai teks yang harus dibaca di dunia perfilman, memuat ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Definisi atau pengertian naskah sendiri merupakan cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tempat atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan di dalamnya. Tulisan pada pengertian naskah tersebut disusun secara sistematis dalam konteks struktur dramatis sehingga menjadi acuan dalam proses produksi. Pengertian naskah bisa disebut sebagai dasar sebuah cerita baik dalam film maupun dalam pementasan pada teater. Biasanya, pengertian naskah ini dibuat sangat dramatis dan menampilkan mengenai *setting* waktu, tempat, kondisi, dan berbagai dialog dari beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Sementara itu di dunia penerbitan, pengertian naskah adalah hasil karya tulisan atau karangan seseorang yang belum diterbitkan. Naskah-naskah karya penulis inilah yang dicari penerbit untuk diterbitkan. Sehingga tanpa naskah, penerbit tidak bisa berbuat apa-apa. Naskah bisa ditulis dengan tangan atau ditulis menggunakan perangkat digital dan biasanya jika sudah selesai akan diserahkan ke editor naskah untuk diperiksa lagi kualitasnya, baru akan dipakai sebagai pegangan.⁷

3. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan,

⁷Salma, "Pengertian Naskah, Jenis-Jenis, dan Cara Penulisan," Penerbitdepublish, 2021, <https://penerbitdepublish.com/pengertian-naskah/>.

pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik kewarganegaraan, persetujuan dari yang diperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, dan kaum minoritas.⁸

4. Demokrasi Kebebasan berpendapat

Secara harfiah, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas yang merupakan suatu keadaan yang bebas atau adanya kemerdekaan, sedangkan pendapat yaitu gagasan seseorang karena sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat adalah sebuah kemerdekaan bagi setiap orang untuk mengutarakan ide atau gagasan terkait sesuatu. Kebebasan berpendapat ialah bagian dari Hak Asasi Manusia. Kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan bentuk dari demokrasi dalam masyarakat, negara serta tatanan kehidupan di negara itu. Sehingga kebebasan yang dikemukakan seseorang merupakan hak bagi setiap orang.⁹

5. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu kegiatan yang identik dengan masyarakat Indonesia. Hidup bernegara dengan ragam suku, budaya, ras, dan agama memang terkadang memerlukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak

⁸Wikipedia, "Evapotranspirasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 2023.

⁹Itsna Neyla, "Dalam Sistem Demokrasi Di Era Reformasi Indonesia" (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, 2023). h. 8-9.

saja. Bukan hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, musyawarah juga diperlukan dalam skala yang lebih sempit, misalnya dalam kehidupan rumah tangga.

Kegiatan musyawarah berperan penting dalam upaya menyelesaikan masalah, terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak. Manfaat musyawarah di dalam masyarakat sangatlah banyak. Bisa dikatakan bahwa musyawarah adalah jalan tengah bagi berbagai perbedaan pendapat dari masyarakat. Musyawarah dapat menyelesaikan masalah secara adil.¹⁰

6. Pendidikan Agama Islam

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin.¹¹ Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.¹²

Sedangkan Ramayulis mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, akhlak, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.¹³

¹⁰Fandy, "Tujuan dan Manfaat Musyawarah," Gramedia blog, 2021.

¹¹Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 32.

¹²Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Araska, 2012), h. 143.

¹³Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 202.

G. Penelitian yang relevan

1. Skripsi yang disusun oleh Itsna Neyla Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023 Yang berjudul “Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat Dalam Sistem Demokrasi Di Era Reformasi Indonesia”.

Dalam penelitian ini kesimpulan akhir yang dipaparkan penulis adalah:

- a. Kebijakan pengaturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat telah diatur secara sah dalam Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat yaitu banyaknya mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap ataupun dipidana setelah mengkritik Presiden, hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang ITE, sehingga menyampaikan kritik dan pendapat dikatakan telah dibungkam. Tidak hanya itu, banyak terjadi peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan tindak kriminalisasi, baik dari pemerintah maupun aparat negara.

Persamaan penelitian di atas terletak pada subjek penelitian, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada judul penelitian dan objek penelitian.

2. Jurnal Yang ditulis Herly Janet Lesilolo, Zamroni, Suyata diterbitkan di Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi Dan Aplikasi Tahun 2015 Yang Berjudul “Kebebasan Siswa Dalam Budaya Demokratis Di Sekolah (Studi Multi Kasus Di SMA Yogyakarta)”.

Dalam tulisan ini kesimpulan akhir yang dipaparkan penulis adalah:

SMA Kolese De Britto Yogyakarta dan SMA negeri 1 Yogyakarta mempraktikkan kebebasan akademik dengan kontrol sosial karena meyakini bahwa, siswa memiliki kapasitas yang kritis dan etis untuk bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan yang dilakukan. Kultur demokratis di sekolah dapat menggerakkan dan merespon secara tepat kebebasan akademik dengan kontrol sosial melalui asumsi, keyakinan, sikap dan praktik demokratis warga sekolah. Kultur demokratis memiliki kapasitas untuk menilai dan melekatkan interaksi, komunikasi, dan perilaku kebebasan warga sekolah dengan kontrol sosial yang tepat. Praktik kebebasan akademik dengan kontrol sosial dalam kultur demokratis di sekolah adalah belajar mandiri. Belajar mandiri merujuk pada belajar tanpa ada intervensi dan pengawasan guru. Siswa menyusun dan menentukan gagasan, metode dan sumber belajar sesuai kebutuhan siswa sendiri.

Persamaan penelitian di atas terletak pada subjek penelitian, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan judul penelitian.

3. Tesis yang ditulis oleh Nurfadhline Jurusan Pendidikan Agama Islam Institu Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016 Yang Berjudul “Bias Gender Dalam Buku – Buku Teks Pendidikan Agama Islam” (Analisis Konten Pada Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam Kelas XII SMA/SMK).

Dalam penelitian ini kesimpulan akhir yang dipaparkan penulis adalah: Berdasarkan kerangka teoritis dan analisis data yang ditemukan dalam penelitian tentang bias-bias gender dalam buku teks pelajaran pendidikan agama Islam kelas XII MA/SMA/SMK/MAK pada buku dari penerbit HUP tahun 2013 yang dikarang oleh Aang Muslih dan Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015, maka berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Gender merupakan cara pandang yang membedakan laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang dikonstruksikan oleh manusia, melalui proses yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Gender juga tidak bersifat menetap dan bukan kodrat Tuhan, sehingga dengan demikian gender dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan tuntutan manusia pada zamannya. Sementara bias gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender.

b. Bahwa buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Sementara buku teks pelajaran pendidikan Agama Islam adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional) yang berkaitan dengan studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mencakup beberapa standar kompetensi atau kompetensi Inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

c. Dalam buku teks pendidikan agama Islam untuk kelas XII MA/SMA/SMK/MAK masih ditemukan adanya bias-bias gender, baik dari segi gambar ilustrasi yang ditampilkan, dalil-dalil yang digunakan, dan pada konten isi materi. namun demikian masih dalam taraf kewajaran sehingga menurut penulis kedua buku ini masih layak dan tepat digunakan siswa sebagai buku pegangan.

Persamaan penelitian di atas terletak pada metodologi penelitian, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada judul penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Landasan Teoretis

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Demos*” dan “*Kratos*”. *Demos* bermakna rakyat, sementara *Kratos* bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.¹⁴

Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kita dapat menelusuri berbagai pendefinisian demokrasi sebagai sebuah ide politik modern seperti berikut ini. Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu:

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
- b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
- c. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis
- d. kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk

¹⁴Ahmad, “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip,” Gramedia.Com, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>. h. 1.

mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat

- e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli:

Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli:

- 1) C.F. Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

- 2) Haris Soche

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.

- 3) Montesquieu

Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

4) Aristoteles

Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai dasar sebagai “Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.”¹⁵

Demokrasi di samping pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu way of life yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya intelegensi, kesehatan, dan keadaan sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan.¹⁶

Demokrasi di sini tidaklah berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karenanya warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap warga negara dari suatu negara yang demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, h. 195.

¹⁶Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 245-246.

Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi yang dengan selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosialnya dalam setiap me pendidikan kewarganegaraan negara dan ketatanegaraan menjadi penting dan sesuatu yang tidak bisa diabaikan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut.¹⁷

Menurut al-Abrasyi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berfikir tanpa terpaku pada pendapat orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan perlakuan adil dan sama terhadap orang tanpa membeda-bedakan status, ras, golongan, agama, maupun yang lainnya. Demokrasi bukan hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara, berpolitik tetapi juga dalam bidang pendidikan. Penerapan demokrasi sangat diperlukan supaya semua siswa memiliki kesempatan yang adil dan sama.

2. Nilai-Nilai Demokrasi

Dalam prakteknya ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu system, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif.

¹⁷Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), h. 163-165.

¹⁸Muhammad Athiyah al-Abrasy, *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), h. 57.

Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi yang menjadi prinsip dasar demokrasi, diantaranya:

- a. Prinsip Kebebasan Kebebasan yang diberikan kepada manusia dapat menyelamatkan diri dari segala macam bentuk tekanan, paksaan, penjajahan dan segala macamnya. Selain itu menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan ini, sementara disaat yang sama juga sebagai hamba tuhan. Dasar kebebasan dalam Islam adalah keimanan, dalam artian kebebasan merupakan nilai dan nikmat yang diberikan Allah kepada setiap manusia.
- b. Prinsip Persamaan Ajaran Islam telah menetapkan prinsip yang tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.
- c. Prinsip Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Prinsip ini berhubungan dengan keadilan sedangkan keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, individual, keluarga, dan Masyarakat.¹⁹

Nilai-nilai demokrasi merujuk pada prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendasari sistem pemerintahan demokratis. Nilai-nilai ini merupakan panduan moral dan etis yang membentuk dasar bagi fungsi dan praktik demokrasi dalam suatu masyarakat. Meskipun nilai-nilai demokrasi dapat bervariasi di seluruh dunia tergantung pada budaya, sejarah, dan konteks politik suatu negara. Nilai-nilai demokrasi juga mencakup:

- a. Kemerdekaan dan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan
- c. Partisipasi politik
- d. Akuntabilitas dan transparansi
- e. Consensus dan toleransi
- f. Pemisahan kekuasaan

¹⁹Ade Imelda Frimayanti, "Pendidikan Demokrasi Dalam Pendidikan Agama Islam," *Lentera Jurnal Ilmiah Kependidikan* 1 (2015): h. 5., [Https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id](https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id).

g. Penghargaan terhadap proses demokrasi

Menurut Saiful Arif, nilai demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat.²⁰

Menurut Hendri B Mayo, mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
- d. Mengakui serta mengangap wajar adanya keanekaragaman (*Diversity*)
- e. Menjamin tegaknya keadilan²¹

Menurut Maswadi Rauf, mengemukakan nilai dalam demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa dan orang dilingkungan sekolah
- b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
- c. Memberikan usul, saran dan pesan kepada pihak sekolah
- d. Menghadiri acara yang diadakan sekolah
- e. Saling menghargai pendapat orang lain²²

a. Tujuan Nilai Demokrasi

Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani, mengemukakan tujuan nilai demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mendidik siswa dan mengantarkan mereka menuju kedewasaan
- 2) Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan disekolah

²⁰Syaiful Arif, *Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, hal. 7.

²¹Suseno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 67.

²²Maswadi Rauf, *Dasar-dasar ilmu pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 19.

3) Memberikan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial

4) Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain²³

Menurut pendapat Hamid Darmidi, tujuan nilai demokrasi yaitu :

1) Memberikan kebebasan bagi Masyarakat maupun siswa untuk memilih dan mengemukakan pendapatnya dalam musyawarah

2) Keterbukaan ide dan gagasan, sehingga semua siswa bisa menerima informasi seoptimal mungkin

3) Mencegah terjadinya perselisihan antar siswa

4) Mengurangi konflik yang terjadi antara siswa²⁴

b. Manfaat Nilai Demokrasi

Menurut Ngalim Purwanto, mengemukakan manfaat nilai demokrasi adalah sebagai berikut :

1) Membeuat siswa memiliki rasa tanggung jawab.

2) Kerjasama antar sesame untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.

3) Meningkatkan rasa empati sesama siswa.

4) Rela berbakti untuk kepentingan sesama dan Kerjasama Bersama.²⁵

Menurut Zainal Arifin, berpendapat manfaat nilai demokrasi adalah sebagai berikut :

1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesama siswa.

2) Menghormati dan melindungi antar sesame siswa.

3) Memahami kewajiban diri sendiri.

4) Menciptakan komunikasi yang aktif.

5) Memberikan kesejahteraan Bersama.²⁶

²³Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Demokrasi ekonomi*, Jakarta: Kata Pena, 2016, hal. 31.

²⁴Hamid Darmadi, *Partisipasi dan Demokrasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 78.

²⁵Ngalim Purwanto, *Desaian Pembelajaran Demokratis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 23.

²⁶Zainal Arifin, *Demokrasi pembelajaran*, (Bandung, Rosda Karya, 2014) h. 4-5.

3. Musyawarah

Dalam Islam demokrasi disebut dengan istilah *syura*, berasal dari kata kerja *syawara- yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat, musyawarah) dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). *Syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.²⁷

Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.²⁸

Dalam Q.S Ali-Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Berdasarkan ayat diatas Quraish Shihab menafsirkan tentang term *syura* dalam QS. Ali Imran ayat 159. Allah membimbing dan menuntun kaum

²⁷Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura perpektif Islam dan Barat*, Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014. h. 6.

²⁸Wayan Kalingga Prisma, "Implementasi Nilai Musyawarah Dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen" (Skripsi, Universitas negeri semarang, 2019). h. 25.

muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada kepada Nabi Muhammad Saw. sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahlembutan Nabi Saw Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan. Nabi tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain²⁹

Musyawarah atau syura merupakan permasalahan penting yang diatur di dalam hukum Islam bahkan para ahli menyatakannya sebagai pondasi seorang hidup berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi dan di dalam pemerintahan sekalipun. Musyawarah merupakan pondasi utama di dalam kekuasaan.³⁰

Permusyawaratan ialah merupakan sistem, suatu cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi bersama, dengan cara mengadakan rapat sebagai forum untuk pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Syarbaini Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Musyawarah merupakan kaidah dasar bagi oposan, yaitu menerima pendapat orang lain tentang suatu masalah. Semua pihak berpendapat bahwa musyawarah dianjurkan. Melihat permasalahannya, musyawarah biasa bersifat umum dan bersifat khusus. Musyawarah yang

²⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 308.

³⁰Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Katur Suhardi (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2019). h. 464.

dilakukan oleh pemerintah atau hakim sifatnya adalah umum karena berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak. Seorang pemerintah membutuhkan masukan pada waktu menyusun undang-undang, mengumumkan perang, membuat perjanjian, dan sebagainya.³¹

Musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan Bersama atau umum.³²

Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya. Musyawarah adalah pembahasan mengenai sesuatu hal yang di hadiri oleh anggota dalam forum rapat. Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah, baik dalam rapat maupun pembahasan lain. Setiap pembahasan yang berkaitan dengan agenda kegiatan memerlukan pemikiran dari anggota.

Pandangan lain tentang musyawarah lazimnya diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit musyawarah berarti ketentuan yang harus ditetapkan sebagai hasil keputusan masyarakat. Secara universal, asas

³¹Wayan Kalingga Prisma, "Implementasi Nilai Musyawarah Dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen" (Skripsi, Sragen, Universitas negeri semarang, 2019). h. 25-26.

³²Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam," *Lentera*, Vol 12 (2013). h. 87-88.

musyawarah ialah eksistensi masyarakat, hak-hak, dan pertanggung jawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya.³³

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat *freedom of speech* sendiri secara harfiah, menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas “kebebasan” yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal wujud dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya-upaya pembatasan yang dilakukan mengingat kembali bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang sudah semestinya diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi terlebih negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Beberapa aturan menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup, perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers.³⁴

Selain menjadi hak dasar kebebasan berpendapat juga dirasa sangat penting dikarenakan beberapa faktor diantaranya: (1) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan

³³Oktaviary indun Permatasari, “Implementasi Musyawarah Dalam Sila Keempat Pancasila Di Masyarakat Desa Pakunden Kecamatan Banyumas” (Skripsi, Banyumas, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019). h. 9-10.

³⁴ Ersu Kusuma, “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol 1, No. 03 (2023). h. 97.

menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.³⁵

Pengembangan selanjutnya dari pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat yaitu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dalam ketentuan Undang-Undang ini ditegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak yang mendasar dalam kehidupan suatu negara terlebih negara demokrasi yang berdaulat serta kebebasan negara ini dilindungi oleh hukum. Sebagai pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.³⁶

Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain dan kebebasan berpendapat ini ini dijamin oleh negara.³⁷

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

³⁵Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, *Ejournal.Balitbangkumham*, Vol 11, No.1 (April 2020), h.2.

³⁶James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta). h. 55.

³⁷Bambang Gunawan Direktur informasi dan komunikasi politik, hukum, dan keamanan, kemkominfo, dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital, pada 23 Maret 2022.

negara yang hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Indonesia adalah negara hukum dan tentunya memiliki ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia. Keberadaan hak asasi manusia tidak di berikan oleh negara, tetapi hak asasi manusia menurut hipotesis John Locke adalah hak individu alami yang dimiliki setiap insan Salah satunya adalah hak untuk berbicara dan hak untuk menyatakan pendapat dimiliki oleh setiap orang Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama.³⁸

5. Kondisi demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi hidup mereka, demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi ekonomi, sosial, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.

Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Belakangan ini demokrasi sering di perdebatkan, ada yang mengatakan demokrasi sedang baik-baik saja dan juga ada yang mengatakan demokrasi sedang tidak baik-baik saja, dikutip dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia cukup membaik, hal itu ditandai dengan meningkatnya indeks demokrasi pada setiap indikatornya.³⁹ Lain halnya dengan data indeks demokrasi dari

³⁸Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." h. 45.

³⁹Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," <https://www.bps.go.id>, 2023, <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.

freedom house Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021-2022 cenderung mengalami penurunan skor dari 59 menjadi 58.⁴⁰

Berdasarkan juga data dari *Economist Intelligence Unit* (kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada 2022. Ini terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang sebesar 6,71 poin pada tahun lalu. Skor tersebut tak berubah dari tahun 2021 yang juga sebesar 6,71 poin. Hanya saja, Indonesia harus turun ke peringkat 54 di dunia. Indonesia pun masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*). Adapun, indeks demokrasi ini disusun berdasarkan lima indikator. Indikator yang memiliki skor tertinggi berasal dari proses pemilu dan pluralisme sebesar 7,92 poin. Fungsi pemerintahan Indonesia memiliki skor sebesar 7,86 poin. Lalu, indikator partisipasi politik memiliki skor sebesar 7,22 poin. Kebebasan sipil di Indonesia mencatatkan skor sebesar 6,18 poin. Posisinya diikuti oleh budaya politik yang memiliki skor sebesar 4,38 poin. Sebagai informasi, indeks demokrasi yang dibuat EIU membagi negara-negara dalam empat kategori. Keempatnya adalah demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.⁴¹

Berdasarkan data dari pemerintah cenderung mengarah pada perbaikan persepsi masyarakat terhadap indeks demokrasi Indonesia, sementara penulis mengamati bahwa kebebasan berpolitik dan berpendapat di Indonesia cenderung menurun, hal ini juga diperkuat dengan berbagai berita di media sosial.

⁴⁰“*freedom house*,” <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>, 2022, <https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-world/2020>.

⁴¹Sarnita Sadya, “Economist Intelligence Unit,” <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>, 2023.

6. Toleransi

Istilah toleransi berasal dari Bahasa Latin, *tolerare* yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat, memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.⁴² Namun demikian, kata toleransi masih kontroversi dan mendapat kritik dari berbagai kalangan, mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif. Akan tetapi, toleransi antarumat beragama merupakan suatu sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama lain. Konsep ini tidak bertentangan dengan Islam.⁴³

Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam Islam adalah hadis nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran. Kemudian Allah dalam firman-Nya juga memberikan patokan toleransi dalam sebagaimana ayat berikut:

⁴²Said Agil Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama* Jakarta: Ciputat. 2003, h. 14.

⁴³Abu Bakar, Uin Sultan, dan Syarif Kasim Riau, "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama," *media komunikasi umat beragama* 7, No. 2 (2015), h. 123.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

Terjemahannya

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

Ayat di atas secara gamblang mengakui eksistensi agama lain, meskipun dengan catatan, sesungguhnya Islam dalam pandangan kaum Muslimin, merupakan satu-satunya agama yang hak. Di mana kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, Islam sebagai agama yang damai dan menebarkan sikap kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain, tidak seperti apa yang digambarkan oleh beberapa kalangan yang tidak senang dengan Islam.⁴⁴

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.⁴⁵

Menurut Tedi Kholiludin, keyakinan yang banyak itu perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang integral, maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati di antara mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Dengan begitu, pendidikan agama yang hadir di lingkungan institusi pendidikan, tentu saja sangat kontributif bagi pengembangan wawasan keindonesiaan yang menjunjung tinggi pluralitas serta heterogenitas.⁴⁶

7. Pendidikan Agama Islam

⁴⁴Bakar, Sultan, dan Riau, Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama, h. 126-127.

⁴⁵H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang). h. 83.

⁴⁶Tedi Kholiludin dkk, Siswa SMA Bicara Agama, Semarang: ELSA press, 2014, h. 8.

a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.⁴⁷

Jadi pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidik tidak saja dituntut menguasai materi pelajaran, strategi, dan metode mengajar, menggunakan media atau alat pembelajaran. Tetapi pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Dalam proses pembelajaran pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, pendidik harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal sehingga tercapai pembelajaran yang efektif.

b. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia memiliki status yang cukup kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1) Dasar Yuridis / Hukum

Adapun dasar dari segi yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu Pertama Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa seluruh bangsa Indonesia harus beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁷Prof. Dr. Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2015, h. 21.

- a) Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa seluruh bangsa Indonesia harus beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Dalam Bab XI, Pasal 29, Ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ia menjamin bahwa setiap orang akan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri.
- c) Implementasi pendidikan agama di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 Bagian Sembilan Pasal 30.⁴⁸

2) Dasar Religius

Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan cara untuk beribadah kepada-Nya. Inilah yang dimaksud dengan dasar religius.

3) Segi Sosial Psikologis

Agama adalah suatu pegangan hidup yang selalu diperlukan oleh setiap manusia di dunia ini. Mereka berlindung dan meminta pertolongan kepada Zat Yang Mahakuasa melalui perasaan yang ada dalam jiwanya.

c. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Tujuan Pendidikan Agama Islam menurut Ramayulis secara umum adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung : Citra Umbara, 2006), h. 13.

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁹

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan insan kamil yang memiliki wawasan kaffah yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan, hamba, dan pewaris Nabi.⁵⁰ "Insan kamil" berarti manusia yang sempurna, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka sempurna atau bersaing dengan Allah Yang Maha Sempurna. Ini adalah manusia sempurna, yang berarti bahwa manusia tumbuh dengan sempurna baik secara fisik maupun mental, memungkinkan setiap potensi bawaan manusia untuk berkembang dengan sempurna tanpa mengabaikan satu potensi pun. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi bawaan setiap orang sehingga mereka dapat menjadi insan kamil dan melaksanakan tanggung jawab kehambaan kepada Tuhan, Sang Pencipta manusia.

Menurut Pusat Kurikulum Depdiknas, tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia adalah untuk meningkatkan keimanan siswa melalui penyediaan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman tentang agama Islam. Tujuannya adalah agar siswa menjadi muslim yang terus berkembang dalam iman, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara mereka.⁵¹

Pendidikan agama, yang sekarang kita kenal sebagai mata pelajaran atau mata kuliah khusus, berakar pada masalah pendidikan sekuler tanpa agama yang dikembangkan oleh pemerintah penjajahan. Pendidikan seperti ini awalnya dianggap masyarakat sebagai metode pendidikan yang menyimpang dari budaya bangsa. Pada akhirnya, orang-orang di Indonesia menuntut agar pelajaran agama diajarkan kembali. Setelah

⁴⁹Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 22.

⁵⁰Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkar. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), h. 83.

⁵¹Ahman Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 7.

UU Nomor 4 Tahun 1950 dan peraturan bersama Menteri Agama tanggal 16 Juli 1951, yang memastikan bahwa pendidikan agama harus ada di sekolah negeri, upaya untuk menghidupkan kembali pembelajaran agama ini mendapat momentum.⁵²

Tujuan pembelajaran agama di semua aspek sosial masyarakat Indonesia tersebut adalah menyebarkan agama dan memberikan pendidikan Islam kepada setiap muslim Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari agamanya dengan benar di mana pun mereka berada. Dengan alasan ini, semua jenis pendidikan, baik umum maupun keagamaan, hanya dapat disebut sebagai "pendidikan Islam" jika orientasinya pada pembelajaran agama Islam.

Semua pendekatan pendidikan islam digunakan dalam pendidikan. Adapun istilah "metode pendidikan" atau "metode pembelajaran" mengacu pada suatu pendekatan atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mengelola pembelajaran di kelas, terutama dalam hal transfer pengetahuan atau transfer nilai. Metode-metode ini membantu guru memaksimalkan pemanfaatan kompetensi yang direncanakan.⁵³

Tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi tujuh tahapan sebagai berikut:

1) Tujuan Pendidikan Secara Universal

Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat dirujuk pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam yang dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan seperti al-Attas, Athiyah, al-Abrasy, Munir, Mursi, Ahmad D. Marimba, Muhammad Fadhil al-Jamali Mukhtar Yahya, Muhammad Quthb, dan sebagainya. Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: Pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan

⁵²Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 35.

⁵³Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. 2006. *Ilmu Pendidikan Pengantar dan Dasardasar Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press). h. 122.

keseimbangan pertumbuhan keperibadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, pada tingkat perorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.⁵⁴

2) Tujuan Pendidikan Islam Secara Nasional

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam nasional ini adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap Negara Islam. Dalam hal ini maka setiap Negara Islam merumuskan tujuan pendidikannya dalam mengacu kepada tujuan universal. Tujuan pendidikan Islam secara nasional di Indonesia, secara eksplisit belum dirumuskan, karena Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam nasional dirujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai berikut: Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵⁵

3) Tujuan Pendidikan Agama Islam Secara Institusional

⁵⁴Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. I, h. 61-62

⁵⁵Abd.Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, Kompilasi Undang-undang & Peraturan Bidang Pendidikan, (Jakarta: FITK PRESS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2010), h. 6.

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam secara institusional adalah tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, samapi dengan perguruan tinggi. Pada tujuan instruksional ini bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, pola takwa itu harus kelihatan dalam semua tingkat pendidikan Islam. Karena itu setiap lembaga pendidikan Islam harus dapat merumuskan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya.⁵⁶

4) Tujuan Pendidikan Islam Pada Tingkat Mata Pelajaran

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran yaitu tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam yang terdapat pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. misalnya tujuan mata pelajaran tafsir yaitu peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an secara benar, mendalam dan komprehensif.

5) Tujuan pendidikan Islam Pada Tingkat Pokok Bahasan

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan adalah tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan (kompetensi) utama dan kompetensi dasar yang terdapat pada pokok bahasan tersebut.

6) Tujuan Pendidikan Islam Pada Tingkat Sub Pokok

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat sub pokok bahasan adalah tujuan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan yang terlihat pada indikator-indikatornya secara terukur.⁵⁷

Dari keenam tahapan tentang tujuan pendidikan agama Islam dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan agama Islam adalah

⁵⁶Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cet. III, h. 32.

⁵⁷Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2009), h. 13.

menanamkan nilai-nilai keagamaan agar siswa mempunyai kecakapan dalam bersikap dan bertindak, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran agama.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik sangat memerlukan sosok yang bisa membimbing mereka dalam memahami secara keseluruhan tentang agama Islam, sosok yang sangat mereka perlukan adalah orangtua atau keluarga yang dapat memberikan mereka pendidikan di rumah dan guru yang dapat memberikan pendidikan di sekolah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari, dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prosedur analisis konten.

1. Pengertian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.⁵⁸

a. Pengertian Analisis Konten

Jenis penelitian ini adalah kajian teks dengan menggunakan metode analisis konten. Definisi analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.⁵⁹ Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan

⁵⁸Muhammad Syafii, “Metode Penelitian Kualitatif,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>.

⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003). h. 257.

secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.⁶⁰ Metode Analisis Konten menurut Krippendorff adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji teks, dokumen, atau buku untuk mengambil kesimpulan berdasarkan konteks penggunaannya.⁶¹

Teks atau buku yang akan dianalisis adalah buku mata pelajaran PAI di SMA. Kemudian hasil dari kesimpulan analisis buku tersebut adalah point-point nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah *human instrumen* yaitu peneliti sendiri. Peneliti mengandalkan pengetahuan, ketelitian dan kekritisan dalam menganalisis dokumen yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Desain Analisis Konten

Penelitian ini menggunakan rancangan analisis konten. Alasan yang mendukung digunakannya analisis isi sebagai dalam rancangan penelitian ini, karena didasarkan pada: sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, masalah yang dianalisis adalah isi teks, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan isi komunikasi dan membuat inferensi menemukan apa yang dimaksud oleh data.⁶²

c. Analisis Sosiologis

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis perlu menggunakan prosedur analisis sosiologis untuk memahami kondisi demokrasi sekarang di Indonesia. Setelah membaca dari berbagai sumber dan melihat serta menganalisis realita sosial soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini justru ada sedikit perbedaan dengan data yang diberikan oleh pemerintah, bedanya data menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini terbilang baik dan cukup baik, sementara pada

⁶⁰Andre Yuris. 2009. *Berkeaan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)*. Lihat di <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>. Diakses pada 9 Agustus 2023.

⁶¹Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 59.

⁶²Moh. Ainin, *Metode Penelitian Bahasa Arab*, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2010). h. 186.

realitanya demokrasi berada dalam kategori setengah bebas. Karena kebebasan berpendapat, berdemonstrasi dan kebebasan individu untuk berbicara didepan publik maupun media massa itu menunjukkan pada umumnya takut berpendapat, kenapa, karena pada umumnya orang yang tidak mempunyai kekuasaan apapun ketika berpendapat atau mengkritik secara langsung maupun lewat media sosial itu perlu kehati-hatian karena takut akan kena pasal karet dari UU ITE.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada buku naskah pelajaran PAI di SMA yang sering digunakan sebagai bahan ajar pada mata pelajaran agama Islam di SMA, yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setyowati cetakan pertama tahun 2021 untuk kelas sepuluh, Mustahdi dan Mustakim untuk kelas sebelas cetakan kedua edisi revisi 2017. HA. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghozali cetakan kedua edisi revisi tahun 2018 untuk kelas dua belas. Dan laporan-laporan tentang kondisi demokrasi di Indonesia data tersebut berupah angka-angka maupun grafik berdasarkan indeks demokrasi yang ada.

Mengutip dari sumber Badan Pusat Statistik, indeks demokrasi Indonesia terbilang baik⁶³, untuk memperkuat data dalam penulisan ini penulis juga menambah data dari *freedom house*, dengan skor 59/100 hal ini menyebabkan demokrasi Indonesia masuk dalam kategori semi bebas.⁶⁴ Menurut pengukuran *Economist intelligence unit*, Yang ditulis oleh Andi Widjajanto Indonesia berada di kategori “*Flawed Democracy*” atau “Demokrasi Terbatas”, dengan skor total 6,71 dan menempati urutan ke-52 di dunia, dari total 165 negara. Kondisi Demokrasi di Indonesia berada di atas rerata global tetapi relatif belum matang. Indonesia dinilai relatif mumpuni pada dimensi hak politik, khususnya proses elektoral. Akan tetapi,

⁶³Badan Pusat Statistik, (<https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html>). (Diakses tanggal 04 Juli 2024).

⁶⁴*Freedom House*, (<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>). (Diakses tanggal 6 Juli 2024).

Indonesia dinilai lemah dalam aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Visi menjadi negara Demokrasi matang dapat terus didorong dengan memastikan proses Demokrasi berjalan dengan normal.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan karya ilmiah ini yaitu analisis konten untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam naskah buku pelajaran PAI di SMA. Sedangkan laporan-laporan demokrasi Indonesia ini akan di analisis dengan refleksi sosiologis.

Refleksi sosiologis biasanya merujuk pada proses pemikiran mendalam mengenai praktik, prinsip, dan hasil dari sistem demokrasi dalam suatu negara atau masyarakat. Refleksi ini penting untuk memahami bagaimana demokrasi bekerja, apa kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana sistem tersebut dapat berkembang.

Dikutip dari sumber UNPAD ditulis oleh arief maulana tahun 2022 menyatakan bahwa dalam 15 tahun terakhir penurunan demokrasi merupakan fenomena global, ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut.⁶⁵ Beberapa di antaranya laporan rutin dari *The economist intelligence unit* indeks demokrasi Indonesia, dan 2021 *Democracy report* yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme dan fungsi pemerintahan. Di sisi lain, hoaks menyebar luas, bahkan fenomena infodemik dan upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata ditangani secara represif menggunakan pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil.

Intinya penulis merefleksikan kondisi demokrasi saat ini tergolong setengah bebas karena kita bisa langsung melihat kondisi demokrasi secara realita yang ada saat ini dimana kebebasan berpendapat, berekspresi dan kebebasan berkumpul untuk menyampaikan pendapat tergolong kurang bebas, dan sering mendapatkan tindakan represif dari pihak keamanan.

⁶⁵Univestias Padjadjaran, (<https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>). (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian Naskah Buku PAI

1. Gambaran Umum Naskah Buku PAI Kelas XII

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Seiring berjalannya waktu buku ini masih tetap digunakan sebagai bahan ajar di SMA maupun SMK walaupun, kurikulum sudah melakukan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka belajar.

Penulis juga memberikan gambaran umum terkait isi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII ini dimana pembelajarannya dibagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya. Akan tetapi, tidak berhenti dengan pengetahuan agama sebagai hasil akhir. Pemahaman tersebut harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata dan sikap keseharian yang sesuai dengan tuntutan agamanya, baik dalam bentuk ibadah ritual yang berhubungan dengan pencipta maupun ibadah yang mengatur hubungan antara sesama dalam sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, sebagai buku pendidikan agama yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, rencana pembelajarannya dinyatakan dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Urutan pembelajaran dirancang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik. Dengan demikian, materi buku ini bukan hanya untuk dibaca, didengar, ataupun dihafal baik oleh peserta didik maupun guru, melainkan untuk menuntun apa yang harus dilakukan peserta didik bersama guru dan teman-teman sekelasnya dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk

mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum, peserta didik diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas disekitarnya. Peran guru agama dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

2. Identitas Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

a. Identitas Buku

Judul Buku	: Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti
Penulis	: HA. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghazali
Penelaah	: Muh. Saerozi dan Bahrissalim
P-review	: Ali Wiyoto
Penyelia Penerbitan	: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Katalog dalam terbitan

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. viii, 304 hlm. : illus. ; 25 cm. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII ISBN 978-602-427-042-1 (jilid lengkap) ISBN 978-602-427-045-2 (jilid 3) 1. Islam -- Studi dan Pengajaran I. Judul II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ke-1: 2015 (ISBN 978-602-282-404-6). Cetakan Ke-2: 2018 (Edisi Revisi). Disusun dengan huruf Myriad pro, 11 pt.

B. Hasil Penelitian

1. Nilai Demokrasi Dalam Konten Buku PAI Kelas XII

Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku PAI Tingkat SMA
Analisis Konten Buku Pai Kelas 3 Sma.

No.	Konten Verbal	Jumlah	Deskripsi
1	Demokrasi	78	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi pada Bab 4 dengan topik Bersatu dalam keragaman dan demokrasi, itu disebutkankan sebanyak 78 kali.
2	Kebebasan Berpendapat	4	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan berpendapat pada Bab 4 dengan topik D. Demokrasi dan syura, itu disebutkankan sebanyak 1 kali. • Kemudian pada topik (E. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Qs. Ali-Imran-3:159 dan hadis terkait) Disebutkan sebanyak 3 kali.
3	Toleransi	7	<ul style="list-style-type: none"> • Kata Toleransi pada Bab 4 dengan topik C.Menganalisis dan mengevaluasi makna Qs.Ali-Imran -3:159 bersikap demokrasi, itu disebutkankan sebanyak 1 kali. • Kemudian pada topik D. Demokrasi dan syura, itu disebutkan sebanyak 1 kali. • Kemudian pada Bab 11

			<p>dengan topik C. Korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, itu disebutkan sebanyak 4 kali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudian pada Bab 9 pada Topik H. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, itu disebutkan sebanyak 1 kali.
4	Musyawara	42	<ul style="list-style-type: none"> • Kata Musyawara pada Bab 4 dengan topik B. Bersatu dalam keragaman disebutkan sebanyak 1 kali. • C.Menganalisis dan mengevaluasi makna Qs.Ali-Imran -3:159 dan hadis terkait tentang bersikap demokrasi, disebutkan sebanyak 12 kali. • Pada topik D. Demokrasi dan syura, itu disebutkan sebanyak 14 kali. • Pada topik E. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Qs. Ali-Imran-3:159 dan hadis terkait, itu disebutkan sebanyak 13 kali. • Kemudian pada Bab 9 pada

			Topik bagian D.Perkembangan dakwah islam di nusantara, itu disebutkan sebanyak 2 kali.
5	Menghargai hak/pendapat orang lain	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab 4 dengan topik Demokrasi dan syura, itu Disebutkan sebanyak 1 kali. • Kemudian pada topik E. Keterkaitan antara demokrasi Dengan sikap tidak Memaksakan kehendak sesuai Pesan Qs. Ali-Imran-3:, itu disebutkan sebanyak 2 kali.
6	Pluralisme/kemajemukan	12	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab 4 dengan topik Bersatu dalam keragaman dan demokrasi, itu disebutkan sebanyak 2 kali. • Kemudian pada topik (B. Bersatu dalam keragaman) disebutkan sebanyak 10 kali.

Setelah saya melakukan analisis pada buku PAI kelas 12 SMA yang berjudul Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti yang ditulis oleh HA. Sholeh Dimyathi dan Feisal Ghazali dan diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud terkait nilai-nilai demokrasi yang saya analisis dimulai dari cover buku sampai pada akhir bab 11 yang dianalisis kata perkata dan bab perbab saya menemukan kata-kata terkait dengan nilai-nilai demokrasi pada buku tersebut.

Demokrasi ditemukan sebanyak 78 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas persoalan saling menghargai dimana suatu

konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat, demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas, demokrasi menyoal nilai-nilai *egaliter*, dan penghormatan terhadap potensi individu. Dari jumlah kata demokrasi tersebut dimana konteks demokrasi lebih menekankan soal musyawarah, dan sisanya membahas soal hak-hak individu, kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Dimana agar setiap orang atau siswa bisa mengutarakan apa yang ia pikirkan demi kelangsungan pendidikan yang membuat orang merdeka dari belenggu kebodohan.

Kebebasan berpendapat 4 kali disebutkan dimana kata itu muncul saat membahas soal demokrasi. Dari jumlah kata kebebasan berpendapat itu dimana konteksnya lebih menekankan soal keterbukaan dan kejujuran saat menyampaikan pendapat dan harus ada kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Toleransi 7 kali disebutkan, kata itu muncul saat membahas soal keragaman merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi dan ditekankan harus saling menghormati, dan menghargai keyakinan orang lain. Dari kata toleransi tersebut dimana konteksnya lebih menekankan untuk saling menghargai dan tolong menolong kepada orang lain.

Musyawarah 42 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas soal musyawara dalam perbedaan pendapat dan mengambil keputusan, dan ayat al qur'an yang membahas musyawarah, dimana musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman maka dari itu hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam persoalan penting. Dari jumlah kata musyawarah tersebut dimana konteks musyawarah 42 kata itu menekankan soal saling menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mencintai musyawara dalam mengambil keputusan pada segala hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Seperti memilih lembaga

pendidikan, osis, memilih tempat kerja, memilih ketua RT, dan lain-lain. Bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat atau merespon pendapat orang lain. Konsisten terhadap hasil keputusan musyawarah terutama menyangkut kepentingan bersama, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Swt, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila ternyata hasil keputusan musyawarah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menghargai hak/pendapat orang lain 3 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas juga soal demokrasi dan musyawarah harus menghargai hak atau pendapat orang lain, dimana konteks kata itu lebih menekankan agar tidak melakukan intimidasi antara guru dan siswa.

Pluralisme/kemajemukan 12 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas tentang bersatu dalam keragaman, pluralitas, dan kebhinekaan, dimana agar supaya Allah Swt, menguji umatnya dalam perbedaan suku, ras, bahasa, dan kulit. Untuk mengetahui siapa yang taat dan yang tidak taat kepada Allah Swt. Dari kata pluralisme/kemajemukan tersebut dimana konteksnya lebih menekankan soal saling menghargai kepercayaan atau keyakinan orang lain.

2. Sejauh Mana Konten Itu Relevan Dengan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia Sekarang?

Selanjutnya penulis melakukan analisis konten yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang sejauh mana konten itu relevan dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia sekarang, dalam naskah buku pendidikan agama Islam tingkat SMA kelas XII, yaitu kalimat-kalimat yang menurut penulis mengandung nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi, hubungan demokrasi terhadap dunia pendidikan sangat aksiomatis, dan integratif, berbagai faktor yang memberikan hubungan yang dapat menentukan pola atau sistem pendidikan dan konsep pendidikan. Dan pendidikan menjadi kondisi prasyarat dalam berdemokrasi. Konsep

demokrasi dalam pendidikan memiliki fungsi sosial, bahwa sekelompok masyarakat tidak akan berkembang tanpa proses sosial. Dan pendidikan sangat bertalian dengan proses sosial tersebut misal, tingkat kenyamanan dalam pendidikan, kebebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Melihat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan maka pendidikan juga harus menerapkan nilai kesetaraan (*egaliter*), penghargaan terhadap hak-hak asasi, perlindungan, dan keadilan.

Nilai demokrasi menempati posisi strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai-nilai tersebut. Namun, jika kita pergi ke keadaan demokrasi di Indonesia sekarang cukup mengalami penurunan yang sangat signifikan beberapa tahun terakhir, dimana data ini diperkuat oleh *freedom house* yakni, skor 58/100 di tahun 2023. Dari sumber tersebut dibandingkan dengan skor ditahun 2024 sebagaimana dikutip dari laporan terbaru *freedom house 2024* mengalami penurunan 1 poin menjadi 57/100. Untuk lebih memperkuat penulis juga mengambil data dari *Economist intelligence unit* dimana skor indeks demokrasi ditahun 2022 dengan skor 6,71 dan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi skor 6,53. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia, jika tahun 2022 berada di peringkat 54, maka tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EUI masih mengelompokkan Indonesia sebagai *flawed democracy* atau demokrasi cacat.

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa demokrasi skala nasional sedang mengalami kecacatan dan itu tentunya dapat berpengaruh sampai pada tingkat pendidikan di sekolah. Jika kita lihat dari uraian tersebut konten demokrasi dalam naskah buku PAI tingkat SMA kelas XII sudah memadai tetapi didalam proses pembelajarannya masi kurang. Akibat dari kurangnya implementasi pembelajaran yang demokratis disekolah itu bisa berdampak pada masyarakat luas, dengan kenyataan ini sekolah belum mengimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu materi demokrasi perlu ditekankan lagi agar kedepannya berdampak lebih luas.

Penyebab demokrasi tidak selaras dengan kehidupan di Indonesia saat ini. Penyebab pertama datang dalam dunia Pendidikan, yaitu masih adanya diskriminasi terhadap siswa sebagaimana dalam berita <https://www.jpnn.com/news/ada-diskriminasi-agama-di-smn-52pemprov-dki-langsung-bergerak-tegas>, dijelaskan bahwa diskriminasi antara guru dan siswa masih terjadi dalam pemilihan ketua osis dimana guru mengatakan bahwa jangan memilih bakal calon osis yang non muslim. Kemudian, masih terjadinya perundungan seperti dimuat dalam berita <https://news.detik.com/berita/d-7200549/polisi-ungkap-kondisi-siswasma-tangselsel-di-bully-geng-sekolah-hingga-masuk-rs>, dijelaskan bahwa perundungan antar siswa senior kepada siswa junior dimana terjadi kekerasan fisik hingga menimbulkan luka. Masih adanya tawuran antar siswa dan sekolah, kekerasan pada guru dan sebaliknya.

Kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat merupakan suatu ekspresi dari seseorang maupun kelompok tanpa ada intimidasi atau intervensi dari siapapun untuk mengucapakan kebebasannya untuk berpendapat, selama kebebasannya itu tidak melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku. Dalam dunia pendidikan kebebasan berpendapat harus diutamakan karena kebebasan berpendapat merupakan esensi dari nilai demokrasi itu sendiri. Kebebasan berpendapat dalam dunia pendidikan khususnya di SMA merupakan suatu nilai demokrasi yang harus diutamakan demi kelangsungan pendidikan yang merdeka.

Kebebasan berpendapat di sekolah seperti adanya timbal balik saat proses pembelajaran atau diskusi antara guru dengan siswa atau sebaliknya. Jika kita lihat kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang mengalami penurunan beriringan dengan kualitas demokrasi, dimana komnas HAM mencatat sepanjang 2020-2021 terdapat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mayoritas peristiwa pelanggaran kebebasan terjadi di ruang-ruang digital, karya jurnalistik, berpendapat dimuka umum, diskusi ilmiah, dan kesaksian di pengadilan.

Dikutip juga dari sumber <https://www.antaranews.com/berita/3864723/setara-institute-infid-angka-kebebasan-berpendapat-turun-di-2023>, lembaga Setara Institut mengungkapkan bahwa subindikator kebebasan berpendapat dalam indeks hak asasi manusia mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.

Kalau dilihat dari kondisi kebebasan berpendapat tersebut dengan relevansi dengan naskah buku PAI kelas XII SMA, maka tidak relevan atau tidak selaras dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan data tersebut penulis menyimpulkan konten demokrasi dalam naskah buku PAI tingkat SMA XII sudah memadai tetapi didalam proses pembelajarannya masi kurang. Akibat dari kurangnya implementasi pembelajaran yang demokratis disekolah itu bisa berdampak pada masyarakat luas, dengan kenyataan ini sekolah belum mengimplementasikan secara maksimal, sehingga buku ini layak dipakai sebagai pegangan guru maupun siswa.

Penyebab kebebasan berpendapat tidak selaras dengan kehidupan diindonesia saat ini. Penyebab pertama datang dalam dunia Pendidikan, yaitu masih adanya diskriminasi terhadap siswa sebagaimana dalam berita <https://www.jpnn.com/news/ada-diskriminasi-agama-di-smn-52-pemprov-dki-langsung-bergerak-tegas>, dijelaskan bahwa diskriminasi antara guru dan siswa masih terjadi dalam pemilihan ketua osis dimana guru mengatakan bahwa jangan memilih bcalon osis yang non muslim. kemudian, masi terjadinya perundungan seperti dimuat dalam berita <https://news.detik.com/berita/d-7200549/polisi-ungkap-kondisi-siswa-sma-tangsel-di-bully-geng-sekolah-hingga-masuk-rs>, dijelaskan bahwa perundungan antar siswa senior kepada siswa junior dimana terjadi kekerasan fisik hingga menimbulkan luka. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya intimidasi kepada siswa sehingga mereka agak takut saat mengutarakan pendapat dalam lingkungan Pendidikan.

Musyawah, musyawarah merupakan proses yang membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawara

juga merupakan suatu kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah agar penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran serta adanya penghargaan terhadap pihak lain. Kondisi musyawarah di Indonesia masi terbilang cukup baik, hal ini karena hampir semua masyarakat kita memecahkan permasalahan umum atau publik diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam dunia pendidikan musyawarah juga terbilang hampir cukup baik dimana penulis mengambil beberapa data tentang musyawarah yang terjadi dilingkungan sekolah, seperti dikutip dari <https://sman3manado.sch.id/2020/09/08/musyawarah-kerja-kepala-sekolah-mkks-sma-kotaman-ado-di-sma-negeri-3manado/>, dan juga dari sumber <https://www.kridanusantara.com/musyawarah-siswa-muswa-2022/>. Data menunjukkan bahwa musyawarah di Indonesia masih terbilang cukup baik hal, dari sini penulis dapat menyimpulkan konten demokrasi dalam naskah buku PAI tingkat SMA kelas XII yang ditulis oleh HA. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghozali relevan sehingga buku ini layak dipakai sebagai pegangan guru maupun siswa untuk lebih meningkatkan nilai musyawarah demi kelangsungan pendidikan.

Toleransi, pluralisme dan kemajemukan, merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleran. Toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya, yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang individu maupun kelompok. Toleransi pluralisme dan kemajemukan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi

toleransi saat ini di Indonesia masih terbelang antara baik dan juga tidak bisa dibilang buruk karena beberapa sumber menyatakan kondisinya masih stagnan atau terhenti data ini diperkuat dari sumber <https://www.voaindonesia.com/a/setara-kondisi-toleransi-di-indonesia-masih-stagnan/7040384.html> atau setara institut melaporkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan, penelitian ini dilakukan menunjukkan rata-rata indkes kota toleran nasional 2022 mencapai 5,03 turun tipis dari tahun 2021 yang mendapat nilai 5,24.

Hal ini menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan atau belum mencapai nilai yang signifikan. Data tersebut agak berbeda dengan data dari kementerian agama republik Indonesia yang dikutip dari <https://kemenag.go.id/opini/catatan-tahun-toleransi-2022-0skqy7> menyatakan bahwa dalam rangka hari toleransi internasional pada tanggal 16 november 2022 72,6 persen responden menilai masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi. Namun tantangannya, untuk menjaga juga dinilai tidak terutama toleransi beragama dan toleransi politik yang senantiasa berpotensi menggerus kohesi kebangsaan kita.

Data tersebut menunjukkan adanya dilema kondisi toleransi dimana data tersebut menunjukkan perbedaan yang tidak jauh signifikan. Untuk memperkuat data tersebut peneliti mengambil indkes toleransi di sekolah tingkat SMA yang bersumber dari <https://setara-institute.org/?s=indeks+toleransi+siswa> atau *Setara institut for Democracy and peace* menyatakan bahwa sebanyak 70,2 persen remaja atau siswa SMA masuk ke dalam kategori remaja toleran, sedangkan remaja intoleran pasif 24,2 persen, intoleran aktif 5 persen, dan remaja yang berpotensi terpapar sebanyak 0,6 persen. Dalam survei ini ditemukan lima faktor yang dapat mempengaruhi sikap toleran/intoleran pada remaja di antaranya; pemahaman wawasan kebangsaan, intensitas penggunaan sosial media, aktivitas harian dan sikap keagamaan dan kondisi sosial ekonomi.

Dari data tersebut menunjukkan kondisi toleransi pluralisme dan kemajemukan di Indonesia masih terbilang cukup baik namun perlu masih juga perlu ditingkatkan. Dalam hal penulis dapat menyimpulkan konten toleransi, pluralisme dan kemajemukan dalam naskah buku PAI tingkat SMA kelas XII yang ditulis oleh HA. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghozali cukup relevan sehingga buku ini layak dipakai sebagai pegangan guru maupun siswa untuk lebih meningkatkan nilai toleransi, pluralisme dan kemajemukan demi kelangsungan umat beragama.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Naskah Buku Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Kelas XII

Dalam pembelajaran disekolah banyak sumber yang digunakan agar materi yang disampaikan selalu update dengan kondisi terkini. Salah satunya sumber pembelajaran adalah buku pelajaran khusus yang berkaitan dengan tema pembelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan sebagainya. Adapun pembahasan dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam diacu pada buku Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud untuk tingkat SMK/MAK Kelas XII.

Penulis akan mengungkapkan isi dari buku tersebut terkait pembahasan nilai demokrasi sebagai berikut:

a. Demokrasi

Demokrasi ditemukan sebanyak 78 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas persoalan saling menghargai dimana suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari jumlah kata demokrasi tersebut dimana konteks demokrasi lebih dari 95 persen menekankan soal musyawarah, dan sisanya membahas soal hak-hak individu, kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Dimana agar setiap orang atau siswa

bisa mengutarakan apa yang ia pikirkan demi kelangsungan pendidikan yang membuat orang merdeka dari belenggu kebodohan.

Pada analisa nilai demokrasi dalam buku ini secara keseluruhan isi bukunya tidak ada yang mempertentangkan antar demokrasi dan pendidikan islam secara spesifik. Hanya saja jika diperhatikan dari rata-rata bab pada buku tidak secara keseluruhan membahas soal demokrasi itu sendiri. Hal ini setidaknya pada bab empat buku ini masih mengandung unsur demokrasi walaupun tidak mengurangi esensi buku. Pada intinya semua materi pada bab ini mengajarkan kita untuk membiasakan diri berperilaku demokratis dengan sesama dan mengambil hikmah atas semua perbedaan yang terjadi.

b. Kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat 4 kali disebutkan dimana kata itu muncul saat membahas soal demokrasi. Dari jumlah kata kebebasan berpendapat itu dimana konteksnya lebih menekankan soal keterbukaan dan kejujuran saat menyampaikan pendapat dan harus ada kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Pada analisa nilai kebebasan berpendapat dalam buku ini secara keseluruhan isi bukunya tidak ada yang mempertentangkan antar kebebasan berpendapat dan pendidikan islam secara itu sendiri. Hanya saja jika diperhatikan dari rata-rata bab pada buku tidak secara keseluruhan membahas soal kebebasan berpendapat. Hal ini setidaknya pada bab empat buku ini masih mengandung unsur kebebasan berpendapat walaupun tidak mengurangi esensi buku. Pada intinya materi pada bab ini mengajarkan kita untuk membiasakan diri berperilaku dengan penuh keterbukaan dan kejujuran dalam penyaluran pendapat dan adanya penghargaan terhadap pendapat orang lain.

c. Musyawarah

Musyawarah 42 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas soal musyawara dalam perbedaan pendapat dan

mengambil keputusan, dan ayat al qur'an yang membahas musyawarah, dimana musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman maka dari itu hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam persoalan penting. Dari jumlah kata musyawarah tersebut dimana konteks musyawarah 42 kata itu menekankan soal saling menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Pada analisa nilai musyawarah dalam buku ini secara keseluruhan isi bukunya tidak ada yang mempertentangkan antar kebebasan musyawarah dan pendidikan islam secara itu sendiri, karena Pendidikan islam juga terintegrasi dengan nilai musyawarah itu sendiri. Hanya saja jika diperhatikan dari rata-rata bab pada buku tidak secara keseluruhan membahas soal musyawarah. Hal ini setidaknya pada bab empat buku ini masih mengandung unsur nilai musyawarah walaupun tidak mengurangi esensi buku. Pada intinya materi pada bab ini mengajarkan kita untuk membiasakan diri bermusyawarah dengan penuh keterbukaan dan kejujuran dalam musyawarah dan adanya penghargaan terhadap pihak lain.

d. Toleransi

Toleransi 7 kali disebutkan, kata itu muncul saat membahas soal keragaman merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi dan ditekankan harus saling menghormati, dan menghargai keyakinan orang lain. Dari kata toleransi tersebut dimana konteksnya lebih menekankan untuk saling menghargai dan tolong menolong kepada orang lain.

Pada analisa nilai toleransi dalam buku ini secara keseluruhan isi bukunya tidak ada yang mempertentangkan antar toleransi dan pendidikan islam secara itu sendiri. Hanya saja jika diperhatikan dari rata-rata bab pada buku tidak secara keseluruhan membahas soal toleransi. Hal ini setidaknya pada bab empat buku ini masih

mengandung unsur toleransi walaupun tidak mengurangi esensi buku. Pada intinya materi pada bab ini mengajarkan kita untuk membiasakan diri berperilaku toleransi terhadap sesama warga negara.

e. Menghargai hak/pendapat orang lain

Menghargai hal atau pendapat orang lain 3 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas juga soal demokrasi dan musyawarah harus menghargai hak atau pendapat orang lain, dimana konteks kata itu lebih menekankan agar tidak melakukan intimidasi antara guru dan siswa.

Pada analisa nilai menghargai pendapat orang lain ini terintegrasi dengan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, sehingga inti dari nilai menghargai pendapat atau hak orang lain ini dimaksudkan untuk mendengarkan juga pendapat dan hak orang lain, tidak serta merta mengklaim kebenaran dari diri sendiri.

f. Pluralisme/kemajemukan

Pluralism atau kemajemukan 12 kali disebutkan dimana konteks kata itu muncul saat membahas tentang bersatu dalam keragaman, pluralitas, dan kebhinekaan, dimana agar supaya Allah Swt, menguji umatnya dalam perbedaan suku, ras, bahasa, dan kulit. Untuk mengetahui siapa yang taat dan yang tidak taat kepada Allah Swt. Dari kata pluralisme/kemajemukan tersebut dimana konteksnya lebih menekankan soal saling menghargai kepercayaan atau keyakinan orang lain.

Pada analisa nilai pluralism/kemajemukan dalam buku ini secara keseluruhan isi bukunya tidak ada yang mempertentangkan antar pluralism/kemajemukan dan pendidikan islam secara itu sendiri. Hanya saja jika diperhatikan dari rata-rata bab pada buku tidak secara keseluruhan membahas soal pluralism/kemajemukan. Hal ini setidaknya pada bab empat buku ini masih mengandung unsur pluralism/kemajemukan walaupun tidak mengurangi esensi buku. Pada

intinya materi pada bab ini mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman kebhinekaan, perbedaan dan kemajemukan.

2. Sejauh Mana Konten Itu Relevan Dengan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia Sekarang

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti yang diterbitkan oleh pusat kurikulum kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2015 sebagai cetakan pertama dan edisi revisi tahun 2018 sebagai cetakan kedua. Analisis nilai-nilai demokrasi dalam Buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK diterbitkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan, dimana penulis akan meneliti konten apasaja yang mengandung nilai-nilai demokrasi dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 yang telah diuraikan panjang lebar di atas, maka penulis akan membahas hasil dari konten tersebut yang sejauh mana konten itu relevan dengan kehidupan berbangsa Indonesia sekarang sebagai berikut :

Demokrasi, berdasarkan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan nilai demokrasi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 sudah baik akan tetapi proses penerapannya masi kurang sehigga berdampak relevansinya/keselarasannya dengan kondisi di Indonesia sekarang. Oleh karena itu nilai demokrasi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti tahun 2018 perlu ditekankan lagi dalam proses pembelajarannya dan diharapkan bisa berdampak kedepan.

Kebebasan berpendapat, berdasarkan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan nilai kebebasan berpendapat dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 baik akan tetapi proses penerapannya masi kurang sehigga berdampak relevansinya/keselarasannya dengan

kondisi di Indonesia sekarang. Oleh karena itu nilai kebebasan berpendapat dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti tahun 2018 perlu ditekankan lagi dalam proses pembelajarannya dan diharapkan bisa berdampak kedepan.

Toleransi, toleransi, berdasarkan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan nilai toleransi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 cukup baik akan tetapi proses penerapannya masi kurang sehigga berdampak relevansinya/keselarasannya dengan kondisi di Indonesia sekarang. Oleh karena itu nilai toleransi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti tahun 2018 perlu ditekankan lagi dalam proses pembelajarannya dan diharapkan bisa berdampak kedepan.

Musyawah, berdasarkan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan nilai musyawarah dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 terbilang baik data menunjukkan bahwa musyawarah di Indonesia masih terbilang baik, dari sini penulis dapat menyimpulkan konten demokrasi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 relevan, sehingga buku ini layak dipakai sebagai pegangan guru maupun siswa untuk lebih meningkatkan nilai musyawarah agar terus berdampak baik demi kelangsungan pendidikan dan masyarakat luas.

Menghargai hak/pendapat orang lain, nilai demokrasi ini sudah terintegrasi dengan demokrasi maupun musyawarah dimana nilai tersebut bergantung pada nilai demokrasi dan nilai musyawarah itu sendiri.

Pluralisme dan kemajemukan, merupakan nilai yang ada dalam demokrasi itu sendiri, sedangkan inti dari pluralisme yaitu paham akan keberagaman dan toleransi merupakan perilaku untuk menghargai

keberagaman itu. Berdasarkan data penulis dapat menyimpulkan pluralisme dan kemajemukan relevan dengan kondisi Indonesia sekarang sehingga buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tahun 2018 relevan, sehingga buku ini layak dipakai sebagai pegangan guru maupun siswa untuk lebih meningkatkan nilai musyawarah agar terus berdampak baik demi kelangsungan pendidikan dan masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kerangka teoritis dan analisis data yang ditemukan dalam penelitian tentang nilai-nilai demokrasi dalam naskah buku Pelajaran Pendidikan agama Islam kelas XII SMA/MA/SMK/MAK dari penerbit pusat kurikulum dan perbukuan, balitbang dan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2018 edisi revisi yang ditulis oleh Ha. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghozali, maka berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam buku teks Pendidikan Agama Islam kelas XII SMA/MA/SMK/MAK masih ditemukan adanya nilai-nilai demokrasi, baik dari segi gambar ilustrasi yang ditampilkan, dalil-dalil yang digunakan, dan pada konten isi materi. Namun demikian masih dalam taraf kewajaran sehingga menurut penulis buku ini masih layak dan tepat digunakan siswa sebagai buku pegangan dan pembelajaran.

Relevansi konten nilai demokrasi dalam naskah buku Pendidikan Agama Islam, memang ada beberapa nilai yang tidak relevan/tidak selaras dengan kondisi Indonesia sekarang seperti konten nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, padahal konten tersebut sudah memadai tetapi didalam proses pembelajarannya masi kurang. Akibat dari kurangnya implementasi pembelajaran yang demokratis di sekolah itu bisa berdampak pada masyarakat luas, dengan kenyataan ini sekolah belum mengimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu materi demokrasi perlu ditekankan lagi agar kedepannya berdampak lebih luas.

B. Saran

1. Agar para guru lebih menekankan dalam memberikan pelajaran yang berkaitan dengan masalah demokrasi, guru harus mampu membantu disetiap kalimat, gambar yang ditayangkan dalam buku PAI.
2. Bagi siswa agar pelajaran Pendidikan Islam dijadikan pelajaran utama, karena menyangkut perubahan sikap dan tingkahlaku, terutama dalam masalah nilai-nilai demokrasi.
3. Agar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Islam untuk lebih menekankan dan tanggap terhadap setiap upaya penyetaraan kebebasan berpendapat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak seminar terkait dengan nilai-nilai demokrasi.
4. Materi tersebut harus ditekankan lagi agar tidak hanya menjadi sekedar iklan atau pajangan dalam buku PAI melainkan melupakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip.”
Gamedia.Com, 2022. <https://www.gamedia.com/literasi/demokrasi/>.
- Badan Pusat Statistik. “Badan Pusat Statistik.” <https://www.bps.go.id>, 2023.
<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.
- Bakar, Abu, Uin Sultan, dan Syarif Kasim Riau. “Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama.” *Media komunikasi umat beragama* 7, no. 2 (2015): 123.
<https://situswahab.wordpress.com>.
- Dwiputri, Fira Ayu, dan Dinie Anggraeni. “Penerapan Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Siswa.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): h.1268.
- Fandy. “Tujuan dan Manfaat Musyawarah.” Gamedia blog, 2021.
“Freedom house.” <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedomworld/2022>, 2022. <https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-world/2020>.
- Frimayanti, Ade Imelda. “Pendidikan Demokrasi Dalam Pendidikan Agama Islam.” *Lentera jurnal ilmiah kependidikan* 1 (2015): h. 5.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1026367>.
- Kusuma, Ersas. “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97.
<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Lukitoaji, beny dwi. *Bahan ajar pendidikan nilai*, 2019.
- M. Abdul Roziq A. “Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Yang Berbasis Pada Lingkungan Sekolah.” *Rontal Keilmuan* Vol 2 No. (2016).
- Muazzinah, Riska. “konsep demokrasi,” 2019.
- Muhammad Syafii. “Metode Penelitian Kualitatif.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>.
- Neyla, Itsna. “Dalam Sistem Demokrasi Di Era Reformasi Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, 2023.

- Nurahman, Unu. "Guru Berbagi _ Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Yang Memerdekakan." <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/cerita/implementasi-nilai-nilai-demokrasi-dalam-pendidikan-yang-memerdekakan/>, 2022.
- Permatasari, Oktaviary indun. "Implementasi musyawarah dalam sila keempat pancasila di masyarakat desa pakunden kecamatan banyumas." Universitas muhammadiyah purwokerto, 2019.
- Prisma, Wayan Kalingga. "Implementasi Nilai Musyawarah Dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen." Universitas negeri semarang, 2019.
- Sadya, Sarnita. "Economist Intelligence Unit." <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>, 2023.
- Salmaa. "Pengertian Naskah, Jenis-Jenis, dan Cara Penulisan." Penerbitdeepublish.Com, 2021. <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-naskah/>.
- Syarkawi. "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam." *Lentera* 12 (2013): 87–88.
- Wikipedia. "Evapotranspirasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Evapotranspirasi>.
- Prof. Dr. Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2005, h.2.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 32.
- Syamsul Huda Rohmadi, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Araska, 2012), h. 143.
- Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 202.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, h. 195.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 245246.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), h. 163-165.

- Muhammad Athiyah al-Abrasy, *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), h. 57.
- Syaiful Arif, *Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, hal. 7.
- Suseno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 67.
- Maswadi Rauf, *Dasar-dasar ilmu pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 19.
- Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Demokrasi ekonomi*, Jakarta: Kata Pena, 2016, hal. 31.
- Hamid Darmadi, *Partisipasi dan Demokrasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 78.
- Ngalim Purwanto, *Desaian Pembelajaran Demokratis* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012), hal. 23.
- Zainal Arifin, *Demokrasi pembelajaran*, (Bandung, Rosda Karya, 2014) h. 4-5.
- Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura perpektif Islam dan Barat*, Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014. h. 6.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 308.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Katur Suhardi (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2019). h. 464.
- Yarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam," *Lentera*, Vol 12 (2013). h. 87-88.
- Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, *Ejournal. Balitbangkumham*, Vol 11, No.1 (April 2020), h.2.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta). h. 55.
- Bambang Gunawan Direktur informasi dan komunikasi politik, hukum, dan keamanan, kemkominfo, dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital, pada 23 Maret 2022.
- Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* Jakarta: Ciputat. 2003, h. 4.

- H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang). h. 83
- Tedi Kholiludin dkk, Siswa SMA Bicara Agama, Semarang: ELSA press, 2014, h. 8.
- Prof. Dr. Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2015, h. 21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung : Citra Umbara, 2006), h. 13.
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 22.
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkar. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), h. 83.
- Ahman Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 7.
- Muhammad Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 35.
- Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. 2006. Ilmu Pendidikan Pengantar dan Dasardasar Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press). h. 122.
- Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. I, h. 61-62
- Abd.Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, Kompilasi Undang-undang & Peraturan Bidang Pendidikan, (Jakarta: FITK PRESS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2010), h. 6.
- Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cet. III, h. 32.
- Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2009), h. 13.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003). h. 257.
- Andre Yuris. 2009. *Berkenaan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)*. Lihat di

<https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>.

Diakses pada 9 Agustus 2023.

Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten*

Buku Teks Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 59.

Moh. Ainin, *Metode Penelitian Bahasa Arab*, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2010). h.

186.

LAMPIRAN

BUKU PENDIDIKAN ISLAM DAN BUDI PEKERTI

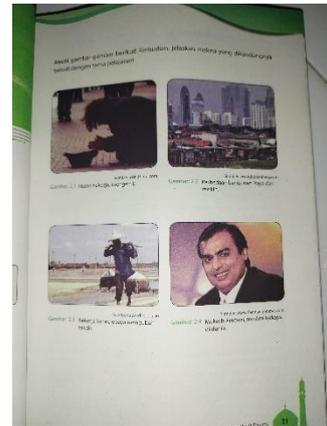
COVER BUKU



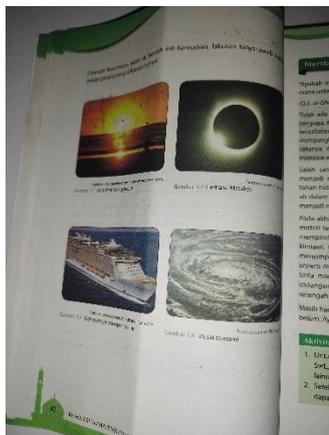
ILUSTRASI BAB I



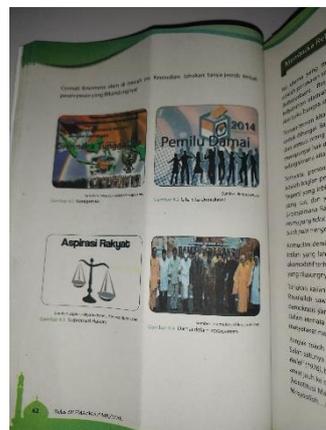
ILUSTRASI BAB II



ILUSTRASI BAB III



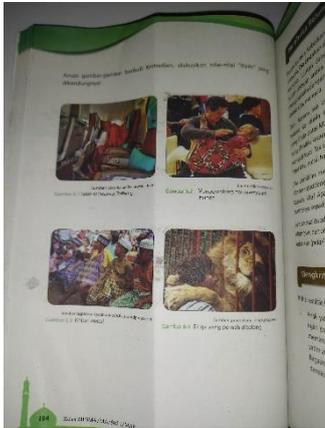
ILUSTRASI BAB IV



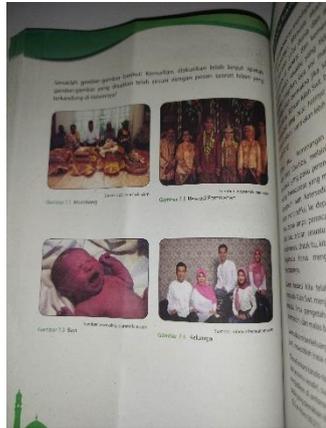
ILUSTRASI BAB V



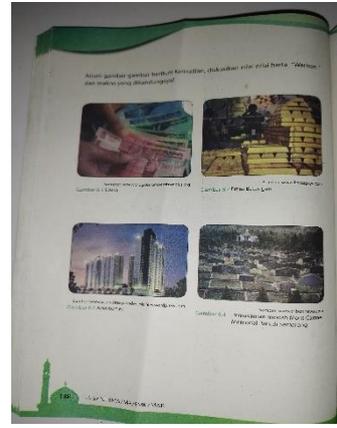
ILUSTRASI BAB VI



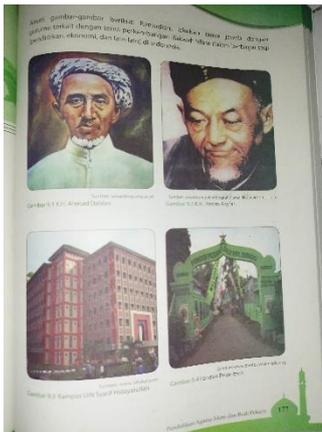
ILUSTRASI BAB VII



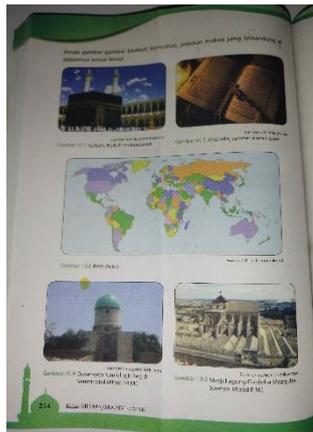
ILUSTRASI BAB VIII



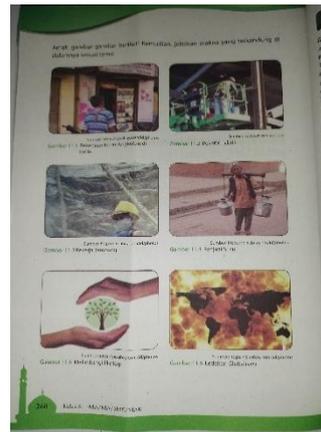
ILUSTRASI BAB IX



ILUSTRASI BAB X



ILUSTRASI BAB XI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Windra Mamonto
Nim : 1923119
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Bongkudai 02 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang
mongondow Timur
Alamat Email : windramamonto01@gmail.com
No. Hp : 081543019289

Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Bongkudai
2. MTS N 1 Bongkudai
3. SMK Fajar Moyongkota